

LAMPIRAN
(Hidayatullah.com)

Anggota Komnas HAM desak Pemerintah Awasi Sekolah Internasional

Senin, 28 April 2014 - 12:10 WIB

“Katakan tidak pada FBI atau dengan negara manapun demi kedaulatan dan kehormatan bangsa ini,” kata Manejer



Pemerintah sibuk memantau sekolah yang dianggap radikal, faktanya, ketika banyak sekolah menyebut diri internasional tak mengajarkan Bahasa Indonesia, PKn bahkan Pendidikan Agama, mengapa diam saja?

Hidayatullah.com—Komisioner Komnas HAM Manejer Nasution mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan pengawasan terhadap semua sekolah-sekolah internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Saran ini disampaikan agar peristiwa yg memalukan di Jakarta International School (JIS) tidak terulang kembali.

Ia juga mendesak pemerintah melakukan investigasi terhadap semua sekolah-sekolah tersebut, disamping soal perijinan, juga soal kurikulum; pendidikan agama, PKn, dan Bahasa Indonesia.

“Dan, jika ternyata mereka tidak mengajarkan itu, ini pelanggaran thd pasal 36 (3) da 37 (1) a (2) UU 20 th 2003, dan wajib untuk dievaluasi, kalau perlu ditutup,” ujar Manejer dalam *rilisnya* Ahad (26/04/2014) malam.

Lebih jauh ia mendorong negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar masyarakat lebih memilih sekolah nasional daripada mengambil resiko dengan sekolah-sekolah yang menyebut dirinya sekolah bertaraf (bertarif) internasional.

Di sisi lain, sehubungan dengan berkembangnya isu bahwa FBI akan ikut ambil bagian dalam kasus JIS, ia mengingatkan agar negara khususnya Polri menerungkan kembali “Trisaktinya Bung Karno” sehingga hadir ketegasan dan keberanian menolak.

“Katakan tidak pada FBI atau dengan negara manapun demi kedaulatan dan kehormatan bangsa ini.”¹

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

¹ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/04/28/20790/anggota-komnas-ham-desak-pemerintah-awasi-sekolah-internasional.html>, diakses 20-05-2014, jam 20.19

Komisioner KPAI Desak JIS perhatikan Pelajaran Agama

Rabu, 30 April 2014 - 13:36 WIB

Jakarta International School (JIS) tidak mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn dan pelajaran Agama. Anggota KPAI berpendapat JIS tak nasionalis



Pemerintah sibuk memantau sekolah yang dianggap radikal, faktanya, ketika banyak sekolah menyebut diri internasional tak mengajarkan Bahasa Indonesia, PKN bahkan Pendidikan Agama, mengapa diam saja?

Hidayatullah.com—Anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPIA) Rita Pramawati mengatakan Jakarta International School (JIS) tidak memiliki kurikulum pelajaran agama.

Untuk itu ia meminta pihak JIS, segera memperhatikan kurikulum yang dinilainya penting ini. Menurutnya, dengan tidak terdapat pelajaran agama, sudah jelas sekolah tersebut melanggar undang-undang yang ada di Republik Indonesia yang mewajibkan kepada seluruh sekolah agar dicantumkan kurikulum agama dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pernyataan ini disampaikan Rita di sela-sela acara “Kriminalisasi Pengusaha Muhammadiyah” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta hari Selasa (29/04/2014) kemarin.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Din Syamsuddin mendukung KPAI untuk tidak takut dengan segala ancaman.

“Tuntaskan segera. Seret ke ranah hukum. KPAI jangan takut akan ancaman-ancaman. Untuk Kemendikbud untuk segera cabut izinya,” tegas Din dalam menjawab pertanyaan salah satu peserta yang hadir.

Sebelum ini, di beberapa media massa, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda menyesalkan karena di Jakarta International School (JIS) tidak memiliki pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn dan pelajaran Agama. Ia berpendapat JIS tak nasionalis.

“JIS tidak ada pelajaran agama, bahasa Indonesia, dan PPKN. Kita berpendapat ini sudah tercabutnya nasionalisme di JIS,” kata KPAI Erlinda kepada wartawan, di Gedung Mendikbud, Jakarta.*²

Rep: Robigusta Suryanto
Editor: Cholis Akbar

² <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/04/30/20925/komisioner-kpai-desak-jis-perhatikan-pelajaran-agama.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.22 wib

Hindari Predator Seksual Anak dengan Islam

Selasa, 6 Mei 2014 - 06:48 WIB

Dalam hukum Islam telah jelas, bahwa hukuman pelaku pedofilia ialah hanya dengan membunuhnya



Ilustrasi: Sang predator kekerasan seksual anak-anak William James Vahey pernah mengajar di Jakarta Internasional School (JIS) lansir FBI. Foto kiri diambil tahun 2013 dan foto kanan pada 1986

Hidayatullah.com—Predator kekerasan seksual terhadap anak-anak yang saat ini sedang sedang menjadi momok bangsa Indonesia, harusnya bisa selesai dengan cara Islam.

Demikian salah satu materi yang disampaikan Hj. Ishmah Cholil, penceramah khusus keluarga di Bekasi baru-baru ini.

Dalam kajian bertema “Kekerasan Seksual pada Anak dan solusi dalam Islam” di Bekasi, Jawa Barat belum lama ini ia menjelaskan bahwa dalam kasus sodomi, Rasulullah dengan tegas menetapkan pelakunya hukuman mati. Ini berdasarkan hadits dari Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi.

Di dalam kasus Jakarta International School (JIS), salah satu pelaku yang berinisial ZA (14 tahun) adalah korban dari gurunya William James Vahey. Jadi ZA korban (abused) kemudian setelah dewasa akan menjadi “pemakan” (abuser). Dan kondisi ini akan trus menular, memproduksi “penyakit” baru.

“Sodomi berawal dari korban (abused) pelecehan seksual di waktu kecil, lalu tumbuh dewasa jadi orang yang memakan korban (abuser),” demikian disampaikan Ishmah Cholil mengutip peneliti dan psikolog Ihsan Gumilar.

Menurutnya, dalam hukum Islam telah jelas, bahwa hukuman untuk pelaku ialah hanya dengan membunuhnya. Tidak ada negosiasi dalam penindakkannya. Hanya saja masalahnya, dalam sistem sekuler seperti ini, penyakit-penyakit sosial dan seksual justru dimasukkan dalam unsur kebebasan HAM.

Misalnya di Barat, anak justru diberi kebebasan untuk menjadi homoseksual atau lesbian padahal ini jelas penyakit. Di sisi lain, program kondomisasi, dan sanksi yang tidak membuat berat para pelaku.

Ia mengingatkan seruan Allah Subhanahu Wata’ala, dalam Surat Thaaha: 24, “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupanyang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

Tugas Bersama

Melihat fenomena maraknya kejahatan seksual yang memburu anak-anak, setidaknya ada tiga pilar yang bisa dijadikan pengaman anak-anak.

Pertama, individu-keluarga. Di mana tugas membimbing, mengarahkan anak adalah tugas orang tua. Targetnya, anak selamat dari api neraka.

Kedua, masyarakat. Sebaiknya anak perempuan sudah diajarkan menutup aurat, menghindari ikhtilat (percampuran laki-laki dan perempuan).

Dan ketiga ialah kewajiban Negara. Dengan menerapkan sanksi keras, melarang tempat-tempat maksiat, dan kurikulum harus berbasis ilmu agama," demikian HJ. Ishmah Cholil.* / Robigusta³

Rep: Robigusta Suryanto
Editor: Cholis Akbar

³ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/06/21097/hindari-predator-seksual-anak-dengan-islam.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.28 wib

Pemerintah Didesak Evaluasi Status Sekolah Internasional

Rabu, 7 Mei 2014 - 10:44 WIB

Bahkan bukan hal baru bila di negeri Muslim sekolah asing melakukan pendangkalan akidah, pemurtadan, kristenisasi dan sekularisasi, serta menjauhkan kaum muslim dari Islam, pemikiran dan hukum-hukumnya



ilustrasi: ACG International School Jakarta

Hidayatullah.com— Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sepanjang periode Januari hingga Maret 2014 telah menerima pengaduan 379 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang menimpa murid TK di Jakarta International School (JIS).

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di lingkungan sekolah belakangan dinilai makin memprihatinkan. Padahal, sekolah dimana seharusnya anak mendapatkan pendidikan, keteladanan, perlindungan dan kenyamanan saat belajar, ternyata menyimpan potensi kejahatan kekerasan dan pelecehan terhadap siswa sekolah.

Menanggapi persoalan ini, Muslimah Hizbut-Tahrir Indonesia (MHTI), mendesak Negara segera melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk mengevaluasi kembali kehadiran sekolah berstatus internasional di Indonesia.

“Peristiwa pelecehan terhadap anak TK di JIS sangat menyakitkan keluarga dan bangsa, karena kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang dalam di lingkungan sekolah bertaraf internasional dengan penjagaan ekstra ketat dan bayaran ekstra mahal. Kasus ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan bertaraf internasional tidak menjanjikan mutu yang menjaga martabat dan kehormatan manusia,” ujar Iffah Ainur Rochmah, Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dalam rilisnya, Selasa (06/05/2014).

Selain mengevaluasi, menurut MHTI, pemerintah beserta jajaran bila perlu dicabut ijin operasinya.

Mengutip data di Kemdikbud, MHTI menyebut ada 111 sekolah internasional di Indonesia yang tersebar di 14 provinsi, dan 43 sekolah asing berada di Provinsi DKI Jakarta.

“Perlu disadari bahwa sekolah asing sangat berbahaya lantaran menjadi sarana efektif penanaman nilai dan gaya hidup yang bertentangan dengan agama dan budaya bangsa. Bahkan menjadi jalan menundukkan kedaulatan melalui loyalitas anak negeri yang diarahkan untuk mengagumi dan menggunakan standar asing dalam menilai segala sesuatu,” tulisnya.

Bahkan bukan hal baru bila di negeri Muslim sekolah asing melakukan pendangkalan akidah, pemurtadan, kristenisasi dan sekularisasi, serta menjauhkan kaum muslim dari Islam, pemikiran dan hukum-hukumnya.⁴

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

⁴ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/07/21195/pemerintah-didesak-evaluasi-status-sekolah-internasional.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.30

Ketua BKSAP: Pedofilia Tragedi Nasional ancam Anak Indonesia

Jum'at, 9 Mei 2014 - 08:22 WIB



Hidayatullah.com—Munculnya banyak kasus korban pedofilia pasca kasus yang terjadi di Jakarta International School (JIS) di Pondok Indah, Jakarta Selatan menunjukkan peristiwa ini menjadi tragedi nasional.

"Saya sangat prihatin, pedofilia adalah tragedi Nasional kekerasan seksual pada anak-anak Indonesia," demikian ditegaskan anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat dalam rilisnya hari Jumat.

Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kasus ini tak ayal mengundang keprihatinan yang sangat mendalam dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, ada masalah besar menyangkut sosial, psikologis, moral yang terkandung di dalamnya. Masalah yang harus segera dicari solusi sebelum menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Permasalahan kejahatan terhadap anak seperti pembunuhan, pelecehan, perkosaan adalah sangat serius. Karena kecuali dampak fisik, dampak psikologis trauma terhadap si korban sangat hebat, diderita sepanjang hidupnya.

"Kejahatan terhadap anak ini tergolong kejahatan luar biasa, dan harus dikenai sanksi hukuman maksimal bagi para pelakunya, perlu dibuat hukuman alternatif misalnya dengan pengkebirian kepada si pelaku dan yang paling tinggi adalah hukuman mati," ungkap Surahman.

Surahman melanjutkan perlu kesadaran dan masyarakat wajib digugah akan bahayanya kejahatan anak tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan agama sejak dini, perlu di tanamkan soal wajibnya menutup aurat kepada anak-anak, masyarakat harus di fahamkan tentang dosa besar perilaku kaum Luth. Mengkampanyekan bahwa selain kasus-kasus seperti korupsi, terorisme, narkoba, perlu menjadi perhatian pula soal kejahatan terhadap anak.

"Informasi melalui jurnalisme media massa maupun blog layak untuk dijadikan perhatian serius, yang mampu mengkampanyekan, mengawal, menginformasikan segala hal berkaitan tentang kekerasan seksual yang dialami anak-anak," tutup Surahman.

Mengutip catatan KPAI, jumlah kejahatan seksual terhadap anak, pada 2012 ada 463 kasus. Tahun berikutnya, yakni pada 2013 mengalami kenaikan 30 persen. Angka tren kekerasan seksual terhadap anak yang mencemaskan. Data KPAI untuk kasus di Jakarta pada kurun Januari-April 2014 saja telah tercatat ada 12 sekolah menjadi lokasi kejahatan seksual yang berlangsung, jumlah total yang diperkarakan ada 85 kasus. Angka ini dinilai sangat fantastis.

“Anak adalah aset bangsa yang nantinya akan menjadi pewaris dan penerus keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jika generasi ini tak dapat diselamatkan, bagaimana dengan nasib bangsa ini kelak.”⁵

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

⁵ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/09/21283/ketua-bksap-pedofilia-tragedi-nasional-ancam-anak-indonesia.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.35 wib

Federasi Muslimat Desak Pemerintah jadi Regulator Lembaga Pendidikan Asing

Ahad, 25 Mei 2014 - 05:53 WIB

Lembaga pendidikan manapun dan khususnya penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain di Indonesia harus mendasari kegiatannya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.



METROTVNEWS

ilustrasi: Jakarta International School (JIS)

Hidayatullah.com – Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai federasi dari 32 ormas muslimah mendesak pemerintah menertibkan segala bentuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar, prinsip, dan tujuan pendidikan nasional.

Penertiban itu tak terkecuali terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, dan harus tetap menjaga rasa keadilan masyarakat, kedaulatan negara yang bermartabat.

Desakan BMOIWI itu menyusul adanya sejumlah aksi kekerasan seks terhadap anak yang terjadi lembaga pendidikan Jakarta International School (JIS) yang dilakukan oleh orang dalam sendiri.

Disebutkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa kurikulum Jakarta International School memiliki fokus internasional yang kuat.

“Kita prihatin maraknya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terutama yang terjadi di lembaga pendidikan. Sangat memprihatinkan kita semua,” kata Presidium BMOIWI Sabriati Aziz kepada hidayatullah.com, Sabtu (24/05/2014).

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di institusi pendidikan menimbulkan keresahan bagi para orang tua dan munculnya rasa was-was terhadap anak ketika berada di sekolah.

Untuk itu, terang Sabriati, lembaga pendidikan manapun dan khususnya penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain di Indonesia harus mendasari kegiatannya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ia menegaskan, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan terang mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Negara tidak boleh absen mengawal spirit tujuan pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama,” tegas Sabriati.

Seperti diketahui, pada April 2014 lalu dilaporkan bahwa seorang siswa Jakarta Internatiobal School berusia lima tahun telah berulang kali diperkosa oleh karyawan bagian kebersihan saat sedang pergi ke toilet.

JIS adalah sebuah sekolah internasional swasta di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1951 untuk anak-anak ekspatriat yang tinggal di Jakarta dan merupakan sekolah dasar dan menengah internasional terbesar di Indonesia.

Sekolah ini mengikuti model kurikulum Amerika Utara dari prasekolah sampai kelas 12 dan telah diakreditasi oleh Western Association of Schools and Colleges dan Council of International Schools. Kurikulum Jakarta International School memiliki fokus internasional yang kuat.

Sementara dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam ketentuan umum disebut berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia.⁶

Rep: Ainuddin Chalik
Editor: Cholis Akbar

⁶ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/25/22076/federasi-muslimat-desak-pemerintah-jadi-regulator-lembaga-pendidikan-asing.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 20.55 wib